

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group

Chazawi, Adami. 2002 Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Edisi Pertama, Cetakan

Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Effendi, Tolib. 2014 Dasar-dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan

Pembaharuan di Indonesia). Malang: Setara Press

E.Y. Kanter, 1992. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.

Jakarta: Alumni Ahmpthm

Prinst, Darwan. 2002. Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Jakarta: Djambatan

Hamzah, Andi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2018. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi

Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2015. Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar

Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

Jakarta

- Ishaq. 2017. *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, Bagir. 2008. *Ilmuwan & Penegak Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indoensia*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Tresna. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Siyoto, Sandu. dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian* .Jakarta: Pradnya Paramita

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. 2013. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Medpress Digital.

Wijaya, Umraty Hengki. 2020. Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Projodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas hukum pidana Indonesia. Bandung. PT Presco

Zulkarnain. 2013. Praktik Peradilan Pidana.. Malang: Setara Press

JURNAL

Afifurrahman, A. (2018). Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuhap. *Jurnal Lex Crimen*, No. 2, Vol. 4, 126.

Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Auditorium* Vol.II No.2 , 131.

I.Rusyadi. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 5, No.2, 130.

Islaini. 2013. *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 27 No.1. Sumatera: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hlm.11

Mamahit, C. (2017). Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.23, 78-79.

- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". Jurnal Yuridika, No. 1, Vol. 32
- Poentang, M. (2014). Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia. Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1, 42.
- Prajatama, H. (2014). Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia. Jurnal Verstek, Vol.2 No.1, 43.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. Jurnal Equilibrium vol.5 Nomor 9, Januari-Juni 2009, 3.
- Ridlwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus, 143.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Perkara. Jurnal Yuridis Unaja, Vol 11 No.2, 20.
- Sulistyo Adi Nugroho, d. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid.B/2017/Pn.Bms). Soedirman Law Review Vol.I No.11, 100.
- Sunarmi. (2007). Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan. Jurnal Equality, Vol. 12, No. 2, Agustus, 133.

Wiharma, C. (2016). Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas. *Jurnal Mimbar Justitia* Vol.II No.01 Januari-Juni, 767.

Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, April 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

